

**LAPORAN BULANAN PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI
PERIODE SEPTEMBER 2015
PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI**

No	Tanggal/Tempat	Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Hasil dan Keputusan	Tindak Lanjut
KERJASAMA BILATERAL					
1.	10 September 2015 Filipina	Pertemuan Bilateral Menteri Pertanian RI dengan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kamboja	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian RI • Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kamboja - 	<p>Hasil Pertemuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan menyampaikan mengenai kerja sama pelatihan bidang karantina yang dilakukan oleh Indonesia, <i>khususnya Kementerian Pertanian RI, telah berjalan secara reguler dari tahun 2011.</i> 2. Sampai saat ini, jumlah peserta yang telah mengikuti program pelatihan bidang karantina sebanyak 16 orang peserta dari berbagai negara yaitu Sri Lanka, Namibia, Papua Nugini, Timor Leste, Sudan, dan Suriname. 3. <i>Bapak Menteri Pertanian juga mengundang peserta dari Kamboja guna berpartisipasi pada pelatihan karantina yang akan dilaksanakan tahun 2016 dengan topik yaitu: (i) Training on Quarantine Action for carries media of animal quarantine pests and diseases, (ii) Training on Quarantine Action for Ruminant animals, (iii) Training on handling and inspection for animal products (leather), (iv) Training on Quarantine Action for animal products (meat), (v) Training on Heat Treatment, (vi) Training on preparation of pest risk analysis, (vii) Training on surveillance of quarantine pest and diseases, and (viii) Training on Assessment for plant quarantine installation.</i> 	Bapak Menteri Pertanian berjanji akan memfasilitasi penuh seluruh peserta pelatihan dari Kamboja.

				<p>4. Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kamboja menyampaikan apresiasi atas kemajuan lembaga pelatihan di Indonesia. Pada kesempatan tersebut pihak Kamboja juga menyampaikan ketertarikannya untuk mengirimkan tenaga perkarantinaannya mengikuti pelatihan di Indonesia. Hal ini sangat penting bagi Kamboja mengingat saat ini sedang berupaya meningkatkan volume export ke berbagai negara tujuan. Bapak Menteri Pertanian berjanji akan memfasilitasi penuh seluruh peserta pelatihan dari Kamboja.</p>	
2.	15 – 17 September 2015 Bandung	Seminar Penyempurnaan Metodologi Ilmiah SKR	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian - BAPPENAS 	<p>1. Pelaksanaan seminar adalah untuk lebih menyempurnakan kembali <i>baseline</i> (dasar) dalam pengukuran dampak proyek-proyek CF-SKR dengan metode evaluasi yang telah dilaksanakan di lapangan dan membahas sampai sejauh mana dampak yang telah dirasakan oleh para petani dengan adanya bantuan dari CF-SKR ini.</p> <p>2. Peserta yang hadir antara lain dari instansi teknis terkait lingkup Kementerian Pertanian dan Bappenas.</p> <p>3. Dalam pertemuan telah dibahas hasil dari monitoring dan evaluasi (monev) yang dilaksanakan oleh tim monev SKR untuk melihat dampak yang dihasilkan dari <i>project-project</i> SKR pada para petani di Indonesia. <i>Interview</i> dilaksanakan di lapangan dengan mewawancarai ketua kelompok tani dan anggota kelompok tani penerima dana CF-SKR TA 2004-2012.</p>	
3.	18 – 20 September 2015, Bali	Monev SKR	Kementerian Pertanian	<p>1. Tim telah berkunjung ke P4S Somya Pertiwi di Tabanan Bali sebagai salah satu penerima dana CF-SKR TA 2015</p> <p>2. P4S Somya Pertiwi memiliki lahan untuk kebun kakao, sawah, kolam ikan, kandang sapi dan ruang pengolahan hasil pertanian, biogas serta pengolahan kompos/pupuk organik</p>	Perlu koordinasi lebih lanjut dengan BPPSDMP

				3. Saat ini P4S Somya Pertiwi telah memanfaatkan dana yang didapat untuk pembangunan asrama bertaraf internasional dan masih dalam proses membangun.	
4.	18 September 2015. Pusat KLN, Kementan	Pembahasan Buku Pemetaan Agenda Pembangunan dan Kebijakan Pertanian Negara Mitra	PSEKP, Litbangtan-Kemtan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB	<ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi kebijakan pembangunan negara mitra dari sudut pandang moneter, fiskal dan pertanian. 2. Identifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan pertanian Indonesia. 3. Sinkronisasi kebijakan pertanian Indonesia dengan kebijakan pembangunan pertanian negara mitra. 	Pusat KLN mengadakan seminar nasional.
5.	22 September 2015 Pusat KLN, Kementan.	Kunjungan Delegasi ETEC Company Colombia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditjen PSP, Kementan 2. Ditjen Perkebunan, Kementan 3. Ditjen PPHP, Kementan 4. Ditjen TP, Kementan 5. Kedutaan Besar Kolombia di Jakarta 6. ETEC Company Colombia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak ETEC Company Colombia menyampaikan paparan terkait <i>water managment</i> yang efisien dan efektif. Sistem tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan Kolombia di beberapa negara seperti negara kawasan Afrika dan Asia Tenggara. Pihak ETEC Company berharap sistem <i>water management</i> yang ditawarkan dapat dilakukan kerja sama dengan Indonesia. Mengingat Indonesia saat ini sedang fokus pada pencapaian swasembada Beras. 2. Kementan menyampaikan akan mempertimbangkan dan menindaklanjuti proposal yang disampaikan oleh ETEC Company Colombia setelah berkoordinasi lebih lanjut di internal Kementan 	PKLN meminta Eselon I teknis untuk membahas kebutuhan sistem <i>water management</i> tersebut terlebih dahulu.
6.	21-24 September 2015 Polandia	Kunjungan Tim Kementan ke Polandia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional 2. Ditjen Peternakan 3. PKLN 4. Kemenlu 	1. Pertemuan bilateral dengan pejabat pemerintah (Kementerian Pertanian dan Pembangunan Daerah Polandia, Mr. Marek Pirsztuk, Chief Veterinary Polandia), dan pertemuan dengan perwakilan swasta terutama dari kalangan Asosiasi Pengolahan Susu, pengusaha Eksportir dan Importir Produk Pertanian, serta kunjungan lapang ke sejumlah perusahaan (pengolahan susu, <i>packing/grading</i> buah segar, pengolahan buah <i>juice</i> apel dan aneka buah-buahan, sayuran beku/ <i>frozen vegetables</i>), serta kunjungan ke rumah potong hewan yang telah memiliki sertifikat halal.	Duta Besar RI untuk Polandia berencana untuk melakukan pertemuan tindaklanjut dengan Kementerian Pertanian di Jakarta. Misi tersebut melibatkan para pengusaha dari Polandia guna melakukan peninjauan kerja sama dengan para pengusaha Indonesia.

				<p>2. Dalam kesempatan pertemuan bilateral, Indonesia menyampaikan masukan terkait penambahan klausul pada Nota Kesepahaman (MoU) terkait pembentukan forum pertemuan bilateral dua-tiga tahun-an (bukan tahunan) yang dilaksanakan secara bergantian, serta didukung oleh working group untuk kegiatan yang lebih konkrit.</p> <p>3. Menghadiri pembukaan pameran internasional <i>Polagra Food Fair</i> di Poznan yang dibuka oleh Menteri Pertanian dan Pembangunan Daerah Polandia.</p> <p>4. Pada rangkaian pertemuan ini, Delri berkesempatan melakukan kunjungan lapang ke beberapa perusahaan berikut: (i) Hortex Juice and Frozen Food Factory, (ii) OSM Towicz Milk Processing Plant, (iii) Bakoma Milk Processing Company, (iv) Slaughtering House, (v) Apple Sorting Plant and Juice Factory at Grojec Region, and (vi) Apple-testing Laboratory at Grojec Region.</p>	
7..	18-19 September 2015, Hotel Pajajaran Suite Bogor	Menghadiri Rapat persiapan pelaksanaan SKB ke-2 Indonesia Maroko	Kementerian/ Lembaga lingkup Pemerintah Pusat dan Pemerintah propinsi DKI	<p>1. Pertemuan membahas mengenai rencana pelaksanaan SKB yang pelaksanaannya akan dibagi dalam 2 (dua) sesi yaitu tingkat Senior Official Meeting (dipimpin Dirjen Asia, Pasifik dan Afrika) pada tanggal 25 Nopember 2015 dan Ministerial Meeting (dipimpin Menteri Luar Negeri RI) pada tanggal 26 Nopember 2015 di Jakarta.</p> <p>2. Untuk kerjasama pertanian diusulkan kerjasama untuk penelitian dan pengembangan gandum tropika, water management, produksi buah-buahan non biji dan peningkatan manajemen penelitian dan pengembangan Badan Litbang Pertanian dengan INRA (Institute national de la Recherche Agronomique) dan menawarkan program peningkatan SDM pertanian melalui pelatihan pengembangan produksi padi lahan kering, pertanian tradisional dan ekonomisasi air.</p>	<p>1. Akan melaporkan mengenai rencana pelaksanaan SKB tersebut termasuk rencana penandatanganan MoU.</p> <p>2. Akan melakukan identifikasi lebih lanjut terhadap beberapa topik dan potensi Kerjasama yang sekiranya dapat dikembangkan dan lebih menguntungkan Indonesia.</p> <p>3. Terkait rencana penandatanganan MoU, dengan mempertimbangkan perlunya kesetaraan</p>

				<p>3. Direncanakan pada pelaksanaan SKB ini juga akan dilakukan penandatanganan sejumlah MoU kerjasama diberbagai bidang diantaranya pertanian.</p> <p>4. Terkait dengan MoU pertanian, draft MoU dimaksud telah dikomunikasikan sejak tahun 2011 dan pihak Maroko mengusulkan agar penandatanganannya dapat dilakukan pada saat pelaksanaan SKB ke-2 di Jakarta.</p> <p>5. Sebagai pertimbangan, hingga saat ini kedua negara belum memiliki payung kerjasama ataupun aktifitas kerjasama dibidang pertanian dan pada pertemuan tersebut Menteri Pertanian Maroko juga tidak hadir sehingga penandatanganan akan diwakilkan kepada Menteri Luar Negeri Maroko.</p>	<p>untuk tingkat Menteri maka akan diusulkan penadantanganan MoU tersebut dilakukan pada saat kegiatan saling kunjung kedua Menteri Pertanian atau secara sirkuler.</p>
8.	29 September 2015 Bali	Pertemuan <i>the first Meeting of joint agricultural working group (JAWG) between Indonesia-Mongolia</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Inovasi dan Teknologi - Kepala Pusat KLN - Perwakilan dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, - BPPSDMP, - Ditjen Tanaman Pangan, - Ditjen PSP, - Ditjen Perkebunan, dan - Kementerian Luar Negeri. 	<p>Beberapa poin penting hasil kesepakatan JAWG tersebut adalah</p> <p>1. Kedua belah pihak sepakat untuk segera merumuskan rencana aksi yang lebih konkrit guna mengimplementasikan berbagai area kerja sama yang terdapat dalam MOU, khususnya kerja sama bidang kesehatan hewan dan perkarantinaan; akses pasar komoditas pertanian antara kedua negara, serta kerja sama penelitian dan penguatan kapasitas. Dalam hal ini, lembaga teknis terkait di kedua negara akan berkomunikasi secara intensif pada level operasional untuk merumuskan bentuk-bentuk kerja sama yang lebih formal.</p> <p>2. Kedua belah pihak sepakat untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan regulasi yang berlaku pada masing-masing negara, guna mendorong akses pasar komoditas perkebunan (kopi, kakao, dan teh) dari Indonesia ke Mongolia; dan akses pasar komoditas hasil peternakan (daging domba dan kambing) dari Mongolia ke Indonesia.</p>	<p>Pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa pertemuan JAWG RI – Mongolia akan diselenggarakan secara rutin dua tahun sekali. Pertemuan kedua JAWG RI-Mongolia akan dilaksanakan di Ulaanbaatar, Mongolia pada Juli 2017</p>

				<p>3. Pihak Mongolia memperoleh informasi mengenai berbagai peraturan yang terkait dengan proses importasi produk peternakan ke pasar Indonesia, dan berkomitmen untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mematuhi tuntutan peraturan dimaksud.</p> <p>4. Pihak Mongolia juga memperoleh informasi tentang profil sejumlah lembaga pelatihan pertanian di Indonesia, dan berkeinginan untuk mengirimkan petugas-petugas pertaniannya belajar di Indonesia</p> <p>5. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Forum Bisnis pada tahun 2016 di Mongolia, guna mempertemukan para pelaku usaha pertanian dari kedua negara dalam rangka mendorong percepatan akses pasar komoditas pertanian.</p>	
9.	30 September 2015 Kemendag Jakarta	Menghadiri forum kerjasama bilateral pemanfaatan tenaga sukarela asing dalam mendukung peningkatan kapasitas daerah	Seluruh kementerian terkait	<p>Forum ini sebagai sosialisasi beberapa hal diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tentang pengajuan dan penempatan tenaga ahli asing 2. Persetujuan pemerintah bagi tenaga ahli asing 3. Penilaian kelayakan dan pengawasan tenaga ahli asing dan 4. Prioritas bidang keahlian tenaga ahli asing 	
KERJASAMA REGIONAL					
1.	12-15 Agustus 2015 Myanmar	Menghadiri pertemuan Special SOM 36 th AMAF dan Special SOM 14 th AMAF+3, nay Pyi Taw, Myanmar	Perwakilan Kemenlu, Kemen KP, Kemen LHK dan ASEAN <i>Secretariat ASEAN Members States</i>	<p>Pokok-pokok yang dibahas pada pertemuan ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tindak lanjut KTT ASEAN ke-25 dan KTT ASEAN 26 - Perkembangan implementasi kerangka kerjasama kebijakan bidang pangan, pertanian, dan kehutanan - Food security - Food safety - Kerjasama bidang pertanian 	Hasil pertemuan SOM-AMAF ke-36 ini akan ditindaklanjuti di pertemuan AMAF ke-37 yang akan dilaksanakan di Filipina, back-to-back dengan pertemuan PrepSOM 37 th AMAF, PrepSOM 15 th AMAF+3, 37 th AMAF, dan

				<ul style="list-style-type: none"> - ASEAN Streamlining - Kerja sama ASEAN Plus Three bidang pangan, pertanian, dan kehutanan - Kerjasama ASEAN bidang pangan, pertanian, dan kehutanan dengan Mitra Wicara, dan Organisasi Internasional <p>Pada pertemuan Special SOM-AMAF+3 ke-1 pertemuan membahas beberapa isu penting yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASEAN <i>Plus Three Emergency Rice Reserve</i> (APTERR) - ASEAN <i>Food Security Information System</i> (AFSIS) - ASEAN <i>Plus Three Strategy on Food Security Bio-Energy</i> 	<p>15th AMAF+3 dan 4th AIMMAF meeting. Serangkaian pertemuan akan dilaksanakan pada tanggal 7-12 September 2015</p>
2.	7-12 September 2015 Manila, Filipina	Menghadiri pertemuan the 37 th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (37 th AMAF), dan 15 th AMAF+3 di Manila, Filipina	Perwakilan Kemenlu Kementan, Kemen KP Kemen LHK dan ASEAN <i>Secretariat</i> ASEAN <i>Members States</i>	<p>Pokok-pokok yang dibahas pada pertemuan ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategi ketahanan pangan dan target capaian menuju dan pasca 2015 - Penguatan kerjasama sektoral dan isu prioritas - Cooperation on Food - Cooperation on Fisheries - Cooperation on Livestock - Cooperation on Forestry - Joint Cooperation and Promotion Scheme Measures - Kerjasama dengan Mitra dialog ASEAN <p>Disela-sela pertemuan AMAF ke-37 ini dilaksanakan bilateral meeting antara RI-Kamboja. Pada kesempatan tersebut pihak Kamboja juga menyampaikan ketertarikannya untuk mengirimkan tenaga perkarantinaannya mengikuti pelatihan di Indonesia. Hal ini sangat penting bagi Kamboja mengingat saat ini sedang berupaya meningkatkan volume ekspor ke berbagai negara tujuan. Untuk itu, Mentan RI mengundang Kamboja berpartisipasi pada pelatihan karantina yang akan dilaksanakan tahun 2016 di Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait beberapa dokumen <i>standard</i> dan <i>guidelines</i> di bidang pangan, tanaman pangan, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang telah mendapatkan pengesahan AMAF, dengan ini diharapkan Kementerian terkait untuk melakukan sosialisasi, harmonisasi, dan implementasi dokumen tersebut dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. - Terkait komitmen negara anggota ASEAN untuk memastikan kecukupan pasokan pangan yang aman dan bergizi tinggi di kawasan melalui implementasi ASEAN <i>Integrated Food Security</i>

			<p>Pada pertemuan AMAF+3 ke-15 pertemuan membahas beberapa isu penting yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) - ASEAN Food Security Information System (AFSIS) - ASEAN Plus Three Strategy on Food Security Bio-Energy 	<p>(AIFS) <i>Framework and Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security (SPA-FS) 2015-2020</i>, diharapkan agar setiap <i>national focal point (NFP)</i> dapat segera mengidentifikasi kepentingan atau prioritasnya untuk dapat terkamodir pada dokumen <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> yang akan disusun oleh masing-masing <i>sectora working group</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementan akan berkoordinasi dengan Kemenlu untuk mempersiapkan rencana penandatanganan ACCAHZ yang diusulkan Malaysia untuk dilaksanakan ditengah-tengah penyelenggaraan KTT ASEAN bulan November 2015 di Malaysia. - Rencana pertemuan AMAF ke-38 dan AMAF+3 ke-16 akan dilaksanakan di Singapura pada tahun 2016. Pihak Singapura akan segera menyampaikan usulan jadwal pelaksanaan. -
--	--	--	---	---

3.	7-11 September 2015 Malaysia	Sidang <i>International Tripartite Rubber Council (ITRC)</i>	Kemdag, Bapeptik, Gapkindo, Kemtan	<p>Isu utama pertemuan secara garis besar melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya yakni sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> membahas mengenai terus melemahnya harga karet dunia; meningkatkan upaya dalam mengontrol kelebihan pasokan yang menyebabkan penurunan harga; mendalami penyebab terpuruknya harga karet dan menemukan solusi bersama. 	<p>Beberapa hal yang menjadi poin penting dari hasil pertemuan ini diantaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Agenda kerja sama karet alam antara ITRC dengan RRT. Rapat sepakat bahwa Thailand, Indonesia dan Malaysia (TIM) perlu melakukan pendekatan untuk kerja sama dengan RRT melalui masing-masing perwakilan diplomatik di RRT dan juga kepada perwakilan diplomatik RRT di masing-masing negara. Pasar Karet Regional/ Regional Rubber Market. Pertemuan sepakat bahwa ITRC/IRCo perlu merumuskan beberapa hal terkait persiapan kerja sama dengan CLMV, baik dalam bentuk afiliasi atau <i>strategic alliance</i>, maupun akses keanggotaan Isu penting lainnya terkait harga karet alam dan perkembangan rubber funds di masing-masing negara anggota ITRC. Malaysia menyampaikan bahwa dengan semakin menurunnya harga karet alam saat ini, setiap
----	---------------------------------	--	------------------------------------	--	--

					<p>negara-negara anggota ITRC harus memiliki program untuk meningkatkan harga karet alam sehingga berada di atas biaya produksi. Biaya produksi gabungan Thailand, Indonesia, dan Malaysia saat ini harus segera dirumuskan sebagai salah satu cara mempengaruhi pasar dalam hubungannya dengan harga dan basis pelaksanaan strategi <i>Agreed Export Tonnage Scheme</i> (AETS). Salah satu cara lain yang juga dapat dilakukan adalah dengan mendukung program-program peningkatan harga karet alam melalui suntikan dana (<i>rubber funds</i>) dari pemerintah di masing-masing negara anggota ITRC, bukan terbatas pada pemberian bantuan kepada petani dalam bentuk <i>agricultural inputs</i> atau pendanaan <i>planting/replanting</i>.</p> <p>4. Upaya meningkatkan harga karet alam. Thailand menyampaikan bahwa ITRC perlu menyusun beberapa proposal strategi dan program-program untuk direkomendasikan kepada</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>para Menteri di MCM ITRC 2015, seperti program-program yang didanai oleh <i>rubber funds</i> dan penyerapan karet alam domestik di masing-masing negara yang dilakukan secara bersama-sama, contohnya proyek <i>rubberised roads</i>. Indonesia sepakat dengan usulan tersebut dan menyarankan perlu adanya <i>knowledge</i> dan <i>technology sharing</i> di antara Thailand, Indonesia, dan Malaysia untuk mendukung realisasi program/proyek tersebut.</p>
4.	10 September 2015 Bappenas, Jakarta	Presentasi Hasil Studi NCT-USAID Engagement with Private Sectors	Kemenlu, Kemenkes, Kemen KP, Kementerian Sekneg, Kementan, Tim Kornas (Sekretariat KSST), USAID.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan USAID bersama dengan Universitas Indonesia melakukan penelitian/kajian terkait keterlibatan swasta dalam mengembangkan Kerja Sama Selatan-Selatan bersama dengan K/L. Mereka menyampaikan temuan mereka, pentingnya swasta untuk membantu perkembangan KSST di Indonesia. 2. Dari presentasi hasil studi dan tanya-jawab, serta beberapa kegiatan NCT sebelumnya, hal-hal pokok apa yang dipandang penting dan perlu ditindaklanjuti, terutama berkaitan dengan membangun relasi/kerja-sama dengan para-pihak dan memperkuat pembelajaran? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Short Term Plan - Perlu ada pilot project sebagai wahana implementasi apa yang telah dipelajari, terutama engage private sector. 2. Hasil yang diharapkan, perbaikan mekanisme koordinasi NCT, engagement strategi, termasuk di dalamnya perbaikan SOP NCT. 3. Waktunya diusulkan dalam 6 bulan (mempertimbangkan proses penganggaran)

5.	14-15 September 2015 Makasar Sulawesi Selatan	Koordinasi BIMP-EAGA Agribisnis Cluster	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat KLN • Propinsi Sulsel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pertemuan, disampaikan bahwa KESR (Kerjasama Ekonomi Sub Regional) BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area) merupakan salah satu dasar terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015. 2. Dalam KESR BIMP-EAGA, terdapat beberapa kelemahan yang diamati, antara lain: masih rendahnya pelaku usaha yang berdampak pada rendahnya tren perdagangan intra kawasan BIMP-EAGA, rendahnya partisipasi daerah, dan masih kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah. Melalui pertemuan ini, diharapkan partisipasi dan keaktifan daerah dalam memanfaatkan kerjasama ini dapat lebih ditingkatkan, karena mengingat tujuan KESR dibentuk sebagai fasilitasi untuk mengurangi kesenjangan di daerah. 3. Pihak Pemprop Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan merupakan sentra ekonomi dan pangan di wilayah Indonesia timur. Propinsi Sulawesi Selatan mendukung KESR ini dan upaya pemerintah pusat untuk memperkokok sinergitas baik lokal dan global, serta untuk memberi dorongan lebih aktif untuk pemda dan pelaku daerah. Peluang dan tantangan daerah dalam implementasi MEA, diantaranya: regulasi yang semakin terbuka, kompetisi antar negara ASEAN yang semakin kuat, sehingga Indonesia perlu memperkuat 2 hal, yaitu skill dan sertifikasi. Sesuai dengan RPJMD Sulsel 2013-2018, Sulsel sebagai pilar utama jejaring kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, Sulsel memiliki salah satu visi yaitu meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional, dan global. Propinsi Sulsel akan mencanangkan ekspor 3 kali lipat dari tahun 2015, dengan tujuan 24 negara, 26 komoditi dan peningkatan ekspor produk pertanian melalui hilirisasi. Selain itu, pada tahun 2018, Sulsel akan memiliki pelabuhan terbesar dengan luas lebih dari 500 Ha. 	Pusat KLN akan segera menyusun draft Task Force BIMP-EAGA Agribusiness Cluster dan akan menyampaikan kepada daerah terkait untuk proses selanjutnya.
----	--	---	--	---	--

				<p>4. Kami menginformasikan bahwa khusus terkait KESR BIMP-EAGA Agribusiness Cluster, membawahi dua isu utama yaitu pertanian dan perikanan. Untuk meningkatkan koordinasi, maka akan dibentuk <i>Task Force</i> BIMP-EAGA Cluster Agribisnis, yang akan mencakup unsur-unsur daerah, khususnya wilayah perbatasan.</p> <p>5. Selain itu, kami mencari informasi terkait rencana pelaksanaan The 3rd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo yang akan dilaksanakan tahun 2016 di Makassar, Sulsel dengan tema "Enhancing Maritime and Food security in BIMP-EAGA". Disampaikan bahwa expo tersebut tentative akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 di CCC (Celebes Convention Centre).</p>	
6.	16-17 September 2015 BBIB Singosari	Rapat Persiapan Pelaksanaan <i>Reverse Linkage</i> Inseminasi Buatan	BBIB Singosari, PKLN Seddit Peternakan dan Bappenas	<p>Teleconference dengan pihak IDB membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal pelaksanaan 2. Teknis Pelaksanaan <p>Rapat juga merupakan koordinasi antara Bappenas, BBIB dan Pusat KLN sebagai koordinator KSS.</p> <p>Kegiatan dilaksanakn dengan 3 program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Peralatan Inseminasi Buatan 2. Ekspor Semen Beku 3. Pengiriman tenaga Ahli <p>Pihak IDB akan memfasilitasi teleconference dengan pihak Kyrgyz, namun BBIB Singosari juga akan berkomunikasi langsung dengan penerjemah untuk berkoordinasi mengenai peserta dan pelaksanaan kegiatan. Sampai dengan saat ini informasi dari Kementerian Luar Negeri, peserta untuk pelatihan AI sudah berjumlah 23 orang Kyrgyz.</p>	<p>Pusat KLN akan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan MoU, Pusat KLN sedang merancang SK <i>Steering Committee</i> untuk <i>Reverse Linkage</i>.</p>

7.	18-19 September 2015 CAPSA Bogor	Koordinasi Kerjasama CAPSA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat KLN 2. Balitbang 3. CAPSA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur CAPSA memaparkan tentang visi dan misi CAPSA sebagai salah satu badan subsider ESCAP yang bergerak dalam pengentasan kemiskinan melalui pertanian berkelanjutan. Lebih lanjut dipaparkan pembahasan program kerja CAPSA, dengan 3 tema utama: <ol style="list-style-type: none"> a. Tema 1: Memahami kemiskinan perdesaan dan kerawanan pangan b. Tema 2: Identifikasi opsi untuk pembangunan pertanian berkelanjutan c. Tema 3: Menentukan opsi pasar yang tepat bagi rakyat kurang mampu 2. Secara umum CAPSA telah berkontribusi dalam memperkuat kapasitas negara-negara anggota untuk mendesain dan mengevaluasi kebijakan dalam memfasilitasi kesejahteraan pedesaan yang berkelanjutan, mendukung pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan, peningkatan nilai tambah, dan peningkatan efisiensi pasar dan rantai nilai. 3. Beberapa aktivitas utama yang dilaksanakan CAPSA melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>analytical research (science, technology, and investment (STI)</i> dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan dan <i>Regional Economic Cooperation and Integration (RECI)</i>) b. <i>policy advocacy</i> c. diseminasi dan jejaring informasi d. training dan <i>capacity building (LIFT project</i> di Myanmar) 4. Untuk arah kedepannya, CAPSA akan memfokuskan pada beberapa kegiatan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. kerjasama regional dengan peningkatan kapasitas sebagai fungsi utamanya, b. mendukung global agenda (UN <i>General Assembly</i> untuk mengadopsi Agenda SDG 2030, UNFCCC dalam rangka mendukung Strategi Global untuk Perubahan Iklim), 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait usulan proposal pengentasan kemiskinan di wilayah timur Indonesia, Puslitbangtan akan segera mengadakan rapat untuk penyusunan proposal dengan melibatkan CAPSA, Setbalitbang, dan PSE-KP. 2. Terkait dengan penyelenggaraan Sidang GC CAPSA ke-12, Kepala Puslitbangtan akan berkoordinasi dengan Setba Litbang untuk mendapatkan arahan selanjutnya
----	-------------------------------------	-------------------------------	--	---	---

				<p>c. meningkatkan kolaborasi dengan Indonesia (mensinergikan dengan strategi kerjasama luar negeri Indonesia, keterkaitan substansi dengan institusi, dan partisipasi daerah)</p> <p>5. Terkait poin 4 c, Kepala Pusat KLN mengarahkan agar CAPSA dapat memfokuskan pada program pengentasan kemiskinan di daerah atau bagian timur Indonesia (contohnya: NTT). Kepala Puslitbangtan juga mendukung arahan ini, serta untuk mendukung upaya pencapaian swasembada pangan khususnya untuk komoditi beras, jagung, dan kedelai. Pihak CAPSA menyambut baik dan akan segera menindaklanjuti untuk pembuatan proposal kegiatan dengan berkoordinasi dengan Badan Litbang Pertanian.</p> <p>6. Selain itu, Direktur CAPSA juga memaparkan mengenai review terhadap CASPA <i>Business Plan</i> 2013-2015 dan rekomendasi GC ke-11, agar CAPSA tetap mendukung implementasi agenda pembangunan berkelanjutan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> peningkatan kualitas data dalam bidang pertanian berkelanjutan Fasilitasi transfer teknologi melalui fokus pada sistem inovasi Eksplorasi perluasan jejaring melalui focal points di kementerian terkait <p>7. Beberapa tantangan dalam pelaksanaan Strategic Plan CAPSA yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengurangan kapasitas penelitian dan pelatihan Diseminasi informasi atau jejaring Peningkatan kontribusi <i>Extra Budgetary</i> (XB) Peningkatan kontribusi insitusional <p>8. Kemudian, terkait persiapan pertemuan <i>Governing Council</i> CAPSA ke-12, Direktur CAPSA menyampaikan harapannya bahwa GC akan dilaksanakan di Indonesia, dengan target sekitar bulan Februari 2016 di Bogor. Format sidang GC</p>	
--	--	--	--	--	--

				tidak mengalami perubahan dari pertemuan sebelumnya. Kemudian, CAPSA juga mengharapkan agar pemerintah Indonesia dapat menjadi tuan rumah jamuan makan malam. Kepala Puslitbangtan yang selama ini menjadi host pertemuan GC menyampaikan bahwa untuk tahun 2016 Badan Litbang belum menganggarkan untuk Pertemuan GC ini.	
8.	19-20 September 2015 Nanning, China	<i>The 6th Roundtable Meeting on ASEAN Plus Three Food Security and the Study Tour on Modern Agriculture</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat KLN dan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Kementerian Pertanian RI; 2. Perwakilan dari Negara-negara ASEAN, yaitu: <i>Brunei, Cambodia, China, Lao PDR, Malaysia, Philippine, Singapore, Thailand, Viet Nam, dan Japan</i> 	<p>Hasil Pertemuan tanggal 19 september 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang perlu dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan nasional, menghasilkan pendapatan yang lebih baik bagi masyarakat dan untuk mendukung pemerintah ; 2. meminimalkan <i>food losses</i> dan memaksimalkan diversifikasi produksi pangan; 3. masalah pasca panen di Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> - kurangnya kesadaran dan pemahaman di tingkat petani dalam hal penanganan pasca panen; - kurangnya penerapan teknologi di semua tingkat proses pasca panen (panen, perontokan, pengangkutan, pengeringan, penggilingan); - rendahnya hasil kualitas biji-bijian <p>Pertemuan tanggal 20 September 2015, para Delegasi mengunjungi Guangxi Academy of Agriculture Science dan The 12th China-ASEAN Expo</p>	<p>Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindak lanjuti untuk mengatasi kurangnya persediaan pangan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengurangi perbaikan infrastruktur pertanian di daerah tadah hujan saat ini; 2. pengenalan padi basah membeli kembali skema; adopsi dari masterplan yang komprehensif untuk kompleks pengolahan beras nasional 3. mengatasi tantangan nasional dalam merealisasikan tujuan bersama untuk keamanan pangan yang berkelanjutan dan gizi
9.	22-23 September 2015	Menghadiri <i>Workshop On Non-Tariff Measures (NTMs)</i>	Perwakilan Kementan, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, BPOM	Workshop ini ditujukan untuk memberikan informasi terkait arti NTMs, serta pentingnya manfaat dan dampak <i>Free Trade Agreement (FTA)</i> bagi NKRI	- Perlunya menyusun NTMs, yang komprehensif dan menjadi komitmen nasional

				<p>Beberapa materi yang dipaparkan pada pertemuan ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi <i>Non-Tariff Measures</i> sebagai Kebijakan untuk mengantisipasi dampak FTA - Materi <i>An Introduce to Non-Tariff Measures</i> - Materi <i>NTM Classification in World Trade</i> - Materi Indonesia <i>Non-Tariff Measures: How to Clasify NTMs</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Diusulkan untuk adanya Komite Nasional terkait NTMs dalam rangka meningkatkan daya saing - Perlunya dibuat cluster untuk NTMs yang memperhatikan masing-masing sektor - Perlunya pelatihan NTMs untuk memperoleh NTMs yang tepat sasaran - Perlu disusun kerangka kerja dan <i>workplan</i> untuk meng-<i>update</i> NTMs.
KERJASAMA MULTILATERAL					
1.	1 - 3 September 2015 Hotel Santika Bogor	<i>International Workshop on Digital Object Identifiers for Rice Germplasm</i> yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 – 2 September 2015 di Bogor dan <i>International Workshop on The Co-development and Transfer of Rice Technology</i> yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 September 2015 di Bogor.	Pertemuan diikuti oleh pemulia tanaman, manajer bank gen dan spesialisasi manajemen Informasi yang berasal dari Indonesia, Italia, Filipina, Brazil, Kenya, China, Laos, Tanzania, dan	Mendefinisikan deskripsi metadata untuk penggunaan <i>Digital Object Identifiers</i> (DOIs) dengan plasma nutfah padi bersama dengan komunitas peternakan serta fasilitasi penyusunan pedoman teknis dan kegiatan pelatihan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan hasil worksop ke ITPGRFA di Roma 2. Pelaksanaan proyek yang telah di workshopkan
2.	1- 2 September 2015 Hotel Salak, Bogor	Rapat Penyusunan Posisi Indonesia khususnya Pembahasan Direktorat Jenderal Hortikultura pada Pertemuan APPPC	Rapat dipimpin Kepala Bidang Keamanan Hayati Nabati dan dihadiri oleh perwakilan dan panitia acara Pertemuan APPPC yang terdiri atas unsur Kementerian Luar Negeri, Badan	1. Pertemuan APPPC ke-29 akan diselenggarakan pada hari Senin-Jumat, tanggal 7-11 September 2015, di Hotel Padma Resort Legian, Bali. Kegiatan akan terdiri dari pertemuan pleno dan <i>fieldtrip</i> ke kebun salak dan kebun bunga di Karangasem.	Tindak lanjut dari rapat ini adalah kiranya Pusat KLN sebagai salah satu panitia penyelenggara dapat hadir berpartisipasi aktif mendukung kelancaran acara Pertemuan tersebut.

			<p>Karantina Pertanian (Barantan), Ditjen Hortikultura dan Pusat KLN.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumen terkait posisi Indonesia telah dikumpulkan dan dikirimkan ke Sekretariat FAO di Bangkok, sedangkan untuk <i>country profile</i>, sekitar 7 (tujuh) negara anggota telah mengirimkannya ke panitia. 3. Panitia registrasi akan menerima <i>soft copy</i> bahan presentasi dari tiap negara anggota pada saat pre-registrasi tanggal 6 Januari 2015 untuk kemudian dikompilasi dan ditayangkan selama Pertemuan berlangsung. 4. Delegasi asing yang sudah terkonfirmasi hadir adalah sebanyak 58 orang yang terdiri atas delegasi dari 22 negara anggota dan termasuk dari CABI, <i>Observer</i>, dan FAO. <i>Chairman</i> pada pertemuan APPPC ke-29 adalah Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati-Barantan. 5. Ketua Delri pada Pertemuan tersebut adalah Kepala Pusat KKIP-Barantan dan beranggotakan delri yang terdiri atas perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Badan Karantina Pertanian, Ditjen Hortikultura, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PSP, Ditjen Perkebunan dan Pusat KLN Kemtan. 6. Berkenaan dengan teknis penyelenggaraan, perwakilan dari Pusat KLN menyampaikan beberapa hal diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya Matriks pembagian tugas hari per hari bagi panitia untuk memudahkan koordinasi saat pelaksanaan kegiatan. - Panitia <i>conference assistant</i> diperlukan di ruang sidang untuk membantu kelancaran sidang. - Tugas panitia <i>drafting committee</i> agar diperjelas karena hampir sama dengan tugas panitia notulensi. Berdasarkan pengalaman pada sidang-sidang terdahulu, yang menjadi <i>drafting committee</i> adalah perwakilan dari delegasi. - Perlunya buku panduan acara sebagai pedoman panitia dalam penyelenggaraan acara Pertemuan ini. 	
--	--	--	---	---	--

				<p>7. Rapat memutuskan bahwa yang menjadi <i>drafting committee</i> adalah perwakilan dari Delegasi Indonesia, sedangkan panitia materi dan persidangan bertugas untuk mem-<i>back up</i> notulensi posisi/materi Delegasi Indonesia dan sebagai <i>conference assistance</i>.</p> <p>8. Terkait dengan persiapan acara, diharapkan panitia dapat hadir satu hari sebelum acara untuk melakukan koordinasi dan pengecekan terakhir pada tanggal 6 September 2015 di Hotel Padma Resort Legian Bali.</p>	
3.	1-3 September 2015 Palembang, Sumatera Selatan	Koordinasi persiapan Diplomatik Tour dalam rangka HPS ke-35	Pusat KLN Kemtan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan, BKP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembahasan program diplomatik tour 2. peninjauan lokasi diplomatik tour 3. peninjauan lokasi acara puncak HPS ke-35 	<ol style="list-style-type: none"> 1. rapat koordinasi panitia daerah diplomatik tour di Palembang 2. rapat pleno persiapan HPS ke-35 di Jakarta
4.	1-3 September 2015 Hotel Sasando, Kupang	Diseminasi Lesson Learned Hasil Kajian Proyek IFAD	Unit Eselon I Kementan Kemenu, Kemenkeu, Bappenas, Pemda Kalbar, Pemda Kab Sanggau & Sambas	Penyampaian paparan Diseminasi Program BLN-IFAD, yaitu: (i) Paradigma Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan: Perspektif Global dan Implikasinya untuk Indonesia (Prof Wayan); (ii) Tinjauan Tematik untuk Mendukung Sukses dalam Replikasi Proyek READ (Prof Firdaus); (iii) Penanggulangan Kemiskinan dengan READ Model (Pimpro READ); dan (iv) Success Story READ Program di Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah (Manajer Program READ Kabupaten Poso)	Kegiatan Diseminasi Lesson Learned Hasil Kajian Proyek IFAD yang dilaksanakan di daerah replikasi proyek READ, yaitu Propinsi Kalbar dan NTT ini selanjutnya akan dibuat dalam bentuk buku laporan
5.	2 September 2015 Kementerian Luar Negeri Jakarta	Rapat persiapan sidang sesi ke-62 <i>Trade and Development Board</i> tanggal 14 – 25 September 2015 di Jenewa.	Kementerian PPN/ Bappenas, Kemenko Bidang perekonomian, Kemdag, Kemprin Kemkeu Kemtan, BKPM dan Kemlu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan draf posisi Delri dan susunan delegasi RI pada sidang dimaksud. 2. <i>High Level Session</i> mengenai reformasi rejim investasi, peran petani kecil dalam produksi dan perdagangan internasional serta persiapan sesi ke-14 Konferensi Tingkat Menteri UNCTAD di Lima, Peru tanggal 14 – 18 Maret 2016 yang akan menentukan mandate UNCTAD untuk 4 (empat) tahun ke depan. 	Kementerian pertanian diminta untuk memberikan masukan terkait ketahanan pangan terkait masukan untuk Delri serta delegasi paling lambat 9 September 2015.

6.	8 September 2015 Kementerian Luar Negeri Jakarta	Rapat Pembahasan Persiapan <i>Launching</i> Inisiatif <i>Zero Hunger</i> <i>Challenge</i> (ZHC)	Kemenkes, Kemenko Pengembangan Manusia & Kebudayaan Biro Umum dan Humas, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan BKP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan tentang <i>Zero Hunger Challenge</i> (ZHC) oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Kemtan. Isi dari pemaparan antara lain: Latar belakang ZHC, pilar ZHC, Persiapan <i>launching</i> ZHC pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2015, dan referensi beberapa negara yang telah melakukan <i>launching</i> ZHC. 2. <i>Launching</i> ZHC di Indonesia akan dilakukan pada saat Peringatan HPS 2015 bulan Oktober di Palembang oleh Bapak Presiden RI dan akan diselenggarakan dengan agenda Bapak Presiden, apakah akan dilakukan pada Saat Acara Puncak HPS ataukah pada saat kunjungan lapangan. 3. Apabila ada workshop ZHC, diharapkan dapat dilakukan sebelum pelaksanaan <i>Launching</i>. 	Hasil rapat ZHC akan dilaporkan pada saat rapat Pleno HPS di Ditjen Perkebunan.
7.	9 September 2015 Pusat KLN	Rapat Persiapan IFAD Asia and Pacific Workshop, 26-29 Oktober, Bali	KTLN, Kemsetneg; BKF, Kemenkeu; Dit. Pendanaan Luar Negeri Multilateral dan Dit. Pangan dan Pertanian Bappenas; Asdep Kelembagaan, Kemenpar; Seditjen Imigrasi, Kemhukham; KKP; BKP, Badan Litbang; BPPSDMP PPSDMP Kementan.	<p>Hasil pertemuan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K/L siap mendukung secara penuh penyelenggaraan kegiatan workshop IFAD. 2. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ditanggung sepenuhnya oleh IFAD. 3. IFAD secara khusus mengharapkan dukungan dari Pemerintah Indonesia terkait: (i) protokoler; (ii) kemungkinan <i>hosting dinner</i>; (iii) <i>cultural performance</i>; serta (iv) bantuan pengaturan <i>field visit</i>. 4. Terkait kegiatan <i>field visit</i> akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Dinas terkait di Bali agar lokasi yang dikunjungi tepat sesuai sasaran. 5. Perihal kehadiran Menteri pada tanggal 26 dan 27 Oktober, mempertimbangkan isu yang akan dibahas maka disepakati secara tentative sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - 26 Oktober: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas - 27 Oktober: Menteri Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tanggal 9 – 11 September, PKLN Kementan bersama dengan IFAD akan melakukan koordinasi awal dengan pihak Dinas Propinsi untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang akan menjadi tujuan kunjungan lapangan (<i>field visit</i>); 2. PKL Kementan akan mengirimkan surat permohonan ijin penyelenggaraan kepada Kemsetneg, Baintelkam, Ditjen Imigrasi dan Barantan untuk permohonan dukungan penyelenggaraan kegiatan;

				6. Terdapat dua Negara, yaitu Afghanistan dan Pakistan yang tercatat memerlukan <i>calling visa</i> dalam proses kedatangannya ke Indonesia. Untuk itu, diharapkan IFAD dapat segera mengirimkan konfirmasi daftar nama peserta dilengkapi dengan copy paspor agar dapat disampaikan kepada Ditjen Imigrasi, Kemhukham.	3. Kementan akan melakukan rapat Interkem sebagai tindak lanjut pertemuan untuk membahas kesiapan Pemri dalam mendukung kesuksesan kegiatan. Pertemuan dijadwalkan paling lambat pada minggu keempat bulan September 2015.
8.	9 September 2015 Ditjen Perkebunan	Rapat Pleno persiapan HPS ke-35 tahun 2015	Kementan, Kemen KP dan Kemen LHK Kemen KI, Perwakilan FAO di Indonesia, BKP Sumatera Selatan dan Pemda Provinsi Sumatera Selatan	Laporan Panitia Pusat dan Daerah per bidang kegiatan HPS ke-35 terkait persiapan dan permasalahan dalam persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing bidang akan mengadakan koordinasi lebih lanjut sebelum rapat pleno berikutnya 2. Rapat Pleno berikutnya di Sumatera Selatan tanggal 21 – 22 September 2015
9.	9-11 September 2015 Bali	Menghadiri Pertemuan <i>29th Session of Asia Pacific Plant Protection Commission (APPPC)</i>	Kementerian Pertanian (Barantan, Ditjen PSP, Ditjen Hortikultura, PKLN), Kementerian Hukum dan HAM, Kemenlu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan <i>The 29th Session of The Asia and Pacific Plant Protection Commission (APPPC)</i>. Konvensi dua tahunan kali ini diikuti oleh 22 negara Asia-Pasifik dan berlangsung selama lima hari mulai 7-11 September 2015 yang bertempat di Bali. 2. Pertemuan APPPC adalah komisi yang menurut ketentuan-ketentuannya bersidang setidaknya sekali setiap dua tahun dan membuka partisipasi bagi semua negara anggota. APPPC merupakan komisi yang menangani perjanjian antar pemerintah yang terkait perlindungan tanaman untuk wilayah Asia dan Pasifik. Salah satu tujuan utama dari komisi tersebut adalah untuk mempromosikan pertukaran informasi tentang perlindungan tanaman di antara negara-negara anggotanya. Hal ini demi kepentingan semua anggota untuk dapat berperan aktif dalam pertukaran informasi tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disepakati bahwa yang akan menjadi tuan rumah Pertemuan <i>The 30th Session of The APPPC</i> adalah negara Selandia Baru dan <i>The 30th Session of The APPPC</i> adalah negara Thailand. 2. Hasil dari kesepakatan beberapa hal di atas akan diusulkan ke pertemuan perlindungan tumbuhan dunia yang diselenggarakan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO di Roma pada 2016.

				<p>3. Pertemuan pada tanggal 7 September dibuka secara resmi oleh Banun Harpini, Kepala Badan Karantina Pertanian mewakili Menteri Pertanian RI. Turut hadir Sekretaris APPPC Dr Piao Yong Fan (Tiongkok) dan Sekretaris International Plant Protection Convention (IPPC) Dr Kyu Ock Tim (Korea).</p> <p>4. Pertemuan diikuti oleh sekitar 70 delegasi dari 21 negara anggota dan observer dari Jepang dan <i>Centre for Agriculture and Biosciences International</i> (CABI). Agenda pertemuan terdiri dari sidang komisi pada tanggal 7-9 September 2015, kemudian fieldtrip ke perkebunan bunga, jeruk dan salak di Karangasem pada tanggal 10 September 2015 dan diakhiri dengan penetapan hasil pembahasan sidang komisi dan acara penutupan.</p> <p>5. Adapun hasil Pertemuan ini membahas kesepakatan beberapa hal penting sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya pencegahan terhadap ancaman penyakit pada tumbuhan dalam rangka menjamin keamanan pangan. Badan Karantina Pertanian selaku <i>National Focal Point</i> untuk perlindungan tanaman menyampaikan peran Indonesia dalam Pertemuan ini sangat penting, karena hasil Pertemuan ini nantinya akan dipakai sebagai pedoman untuk menetapkan standar internasional kesehatan tumbuhan. Saat ini Indonesia sedang mendorong terus peningkatan produksi pertanian seperti padi, gula, daging, jagung, kedelai, tanaman hortikultura, cabai, dan bawang merah. - Bagi Indonesia, ikut terlibat dalam pembahasan standar kesehatan tumbuhan menjadi sangat penting terlebih dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan segera di berlakukannya pada akhir tahun ini. Dengan konsekuensi pergerakan barang yang sangat terbuka, Indonesia harus siap. Dengan Pertemuan inilah Indonesia akan mendapatkan informasi teknis mengenai status kesehatan tumbuhan pada 	
--	--	--	--	---	--

				<p>masing-masing negara peserta dan juga cara menanggulangnya untuk dapat menjamin keamanan pangan, khususnya pangan asal tumbuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selain itu, Pertemuan ini dimanfaatkan Indonesia untuk mensosialisasikan beberapa kebijakan pengendalian penyakit yang sudah ada, termasuk penetapan standar penting kesehatan tumbuhan yang diharapkan dapat diaplikasi di negara lain sehingga dapat menguntungkan posisi tawar perdagangan nasional. Dengan mengetahui penerapan standar kesehatan tumbuhan negara lain diharapkan dapat mengakselerasi produk ekspor asal tumbuhan Indonesia. Sebagai contoh, penerapan pengendalian teknis penyakit tumbuhan terhadap lalat buah, di mana penyakit ini telah menjadi momok tidak saja untuk kawasan Asia Pasifik, namun dunia yang secara ekonomi sangat merugikan. - Isu <i>e-certificate</i>/ elektronik sertifikasi menjadi agenda pembahasan tersendiri pada konvensi kali ini, dimana negara peserta dari kawasan Pasifik khususnya Australia dan Selandia Baru yang telah menerapkan sistem ini berbagi informasi dan teknologi dalam penerapan pengakuan keamanan pangan asal tumbuhan secara elektronik. Upaya penerapan elektronik sertifikasi menjadikan proses sertifikasi kesehatan tumbuhan dapat dilakukan sebelum barang dikapalkan perlu terus didorong sehingga memudahkan penanganan di pintu-pintu pemasukan baik pelabuhan, bandar udara maupun pos lintas batas. Hal ini sangat strategis untuk menyiapkan negara-negara Asia Pasifik yang merupakan produsen pangan asal tumbuhan terbesar di dunia di era perdagangan global. 	
--	--	--	--	--	--

10	9-11 September 2015 Bali	Pertemuan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi Bali dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan <i>IFAD Regional Workshop: Innovation for Rural Transformation</i>	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan pihak Manajemen Hotel Inter Continental Bali	<p>Poin-poin penting hasil pertemuan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertemuan bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi untuk kegiatan kunjungan lapang (<i>field visit</i>) tanggal 29 Oktober 2015. Mengingat jumlah peserta yang cukup besar, maka kegiatan <i>field visit</i> akan dibagi ke dalam lima atau enam grup dengan tujuan yang berbeda. Beberapa <i>rural development</i> sites yang berhasil diidentifikasi diantaranya adalah (i) <i>Subak system & groups "Guamo"</i> di Tabanan; (ii) <i>Integrated Agricultural System of Tri Hita Karana</i> atau Sistem Pertanian Terintegrasi/SIMANTRI di Karangasem; (iii) <i>Agrotourism</i> Kopi Luwak di Kintamani; (iv) <i>Coastal Community Development Project (CCDP) Learning Center</i> di Badung; serta (vi) Konservasi terumbu karang di Pulau Serangan. Terkait waktu dan jarak ke lokasi, perlu dipertimbangkan susunan kegiatan <i>field visit</i>, apakah tetap sesuai ide awal IFAD yaitu <i>half-day (field visit – free program)</i> atau <i>full day (field visit – wisata)</i>, contoh: kunjungan ke Subak Guamo di Tabanan dan dilanjutkan dengan <i>sightseeing</i> di Tanah Lot. Perlu dipertimbangkan pula pengaturan logistik dan implikasi terhadap pembiayaan. <p>Pada prinsipnya seluruh Dinas terkait menyambut baik dan menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan workshop internasional ini.</p>	PKLN akan menyampaikan surat permintaan daftar usulan lokasi kunjungan sebagai tindak lanjut pertemuan. List final diharapkan dapat diterima pada tanggal 16 September 2015.
11.	10 September 2015 RR SG-3, Bappenas	Presentasi Hasil Studi Engagement of Universities, Civil Society and Private Sector	USAID, LPEM UI, Kemenkes, Kementan, KKP, Kemenkeu, Setneg	Relasi atau kerja sama dengan <i>non government actors</i> yaitu universitas-universitas di Indonesia, organisasi-organisasi masyarakat dan sektor swasta dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan (<i>South-South Cooperation/SSC and South-South Triangular Cooperation/SSTC</i>)	Rencana Aksi dan tindak lanjut <i>National Coordination Team (NCT)</i> dan USAID dalam membangun relasi/kerjasama dengan para pihak dan memperkuat pembelajaran

12.	11-12 September 2015 Bogor	Rapat Persiapan Bahan Posisi Delri pada Sidang EB IFAD ke-115	Setba BPPSDM Pertanian dan Setba Badan Ketahanan Pangan	Matriks posisi DELRI pada Sidang EB- IFAD ke-115	Pusat KLN akan mengkompilasi masukan sesuai dengan pembagian maktris posisi sebagaimana tupoksi untuk kemudian dijadikan bahan final posisi Delri pada Sidang EB-115 IFAD.
13.	15 September 2015 Hotel Royal Kuningan, Jakarta	Pertemuan Working Group 1 (WG 1) Indonesia-UN Consultative Forum (IUNCF)	Direktur PLNM, BAPPENAS dan perwakilan dari UN Indonesia sebagai narasumber dan perwakilan dari Kemenlu, Kemperin Kemenkeu Kementan (Pusat KLN dan BKP), Kementrian LHK, Kemenaker, Kemenkes Kementerian KI Kemensekneg, BAPPENAS, BNPB, Komisi Nasional untuk UNESCO, Kementerian P & K dan Kementerian PU, perwakilan UNICEF, WFP, FAO, UNDP, UNIDO, ILO, UNCAPSA, UN HABITAT, UNFTA, UNOCHA, UNORCHID, dan UNHCR.	Berdasarkan hasil pertemuan telah dilengkapi Daftar kerjasama Pemri dengan badan-badan PBB beserta tantangannya berdasarkan masukan dari peserta yang hadir, untuk <i>flowchart</i> masih akan menerima masukan secara tertulis baik dari Pemri maupun dari Badan-badan PBB dan juga telah dilengkapi daftar <i>focal point</i> di masing-masing Kementerian yang menjadi pintu utama kerja sama dengan Badan-badan PBB.	Akan dilaksanakan WG II pada tanggal 7 Oktober 2015 yang akan membahas: - Rencana standardisasi HCA & perkembangan pendirian UN House; - Sistem pembayaran pajak dan bea cukai untuk barang yang telah selesai proyeknya atau pun yang sedang berlangsung; dan 3. Terkait konsuler dan imigrasi.
14.	16 September 2015 Kemeterian Luar Negeri, Jakarta	Rapat Koordinasi Penyusunan Matriks Implementasi Komitmen Indonesia di G20 Tahun 2015	Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Bappenas, Kemendag, Kemenaker, Kementan, Kem.ESDM, Kemenlu, KPK, BI, BKPM, Unpar	Masukan <i>Compliance Report</i> atau Laporan Pemenuhan Komitmen dari Universitas Toronto terkait persiapan awal KTT G20 dari beberapa K/L serta lanjutan pembahasan matriks cetak biru (buku 2) dari berbagai sektor	K/L akan menyiapkan masukan <i>Compliance Report</i> atau Laporan Pemenuhan Komitmen dari Universitas Toronto dan menyempurnakan matriks cetak biru

15.	17 September 2015 Gedung Bulog, Jakarta	Rapat Persiapan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO X	Kementan, Kemenkeu, Kemendag, Kemenlu, Bulog,	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Updating</i> perkembangan perundingan Pertanian secara umum - Pembahasan isu <i>Public Stockholding for Food Security Purposes</i> (PShFS) - Pembahasan isu <i>Special Safeguard Mechanism</i> (SSM) 	KL/ dimohon untuk dapat menentukan komposisi anggota tim Satgas G-33 yang baru
16.	18 September 2015 Shangri-La, Jakarta	Soft Launching BUR&FREL dan Sosialisasi Hasil Pertemuan Bonn	Setneg, Kemenko, Kemendagri, Kemenlu,	Biennial Update Reports (BUR) dan Forest Referece Emission Level (FREL)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mensubmisi penyusunan BUR & FREL ke Sekretariat UNFCCC
17.	22 September 2015 Kemendag, Jakarta	Rapat Persiapan Sidang Committee on Agriculture (CoA) tanggal 24-25 September 2015	Kemendag, Kemlu, Kementan, Kemenperin dan Kemenko	Bahan Sidang terkait jawaban atas pertanyaan Australia terkait Surat Edaran Mendag No. 1300/M-DAG/SD/12/2014 perihal Instruksi Pendistribusian Gula Kristal Rafinasi	Jawaban atas pertanyaan Australia sbb: Surat Edaran Mendag No. 1300/M-DAG/SD/12/2014 perihal Instruksi Pendistribusian Gula Kristal Rafinasi, bertujuan untuk menyalurkan langsung gula rafinasi kepada industry pengguna (makanan, minuman dan farmasi). Surat tersebut hanya mengatur distribusi dalam negeri dan tidak terkait dengan importasi
18.	27 - 29 September 2015 Palembang Sum-Sel	Koordinasi Persiapan HPS ke-35	Kementan, Kemenlu dan Pemda Sum-Sel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentative Agenda Diplomati Tour 2. Rundown Acara Pucak HPS dan Kunjungan lapang presiden RI 3. laporan persiapan masing-masing bidang panitia HPS ke-35 4. Layout lokasi acara puncak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. koordinasi antara bidang dalam finalisasi acara puncak peringatan HPS ke-35 2. Rapat finalisasi tgl 16 Oktober 2015

19.	28 September 2015 Kemendag	Rapat Pembahasan Komposisi Panelis Kasus Sengketa DS477 dan DS478: Kebijakan Importasi Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan	Kemendag, Kementan, Kemenlu, dan Lawyer	Komposisi Panelis Kasus Sengketa DS477 dan DS478: Kebijakan Importasi Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan, yaitu Ketua Panel : Cristian Espinosa (Ecuador); Anggota Panel: Helgason (Iceland) disetujui, namun tetap mengusulkan Maghdi Marahat (Mesir), jika hal tersebut tidak disetujui Amerika, maka hal ini akan diserahkan pada Dirjen WTO untuk memutuskannya.	Kemendag akan menyampaikan Komposisi Panelis Kasus Sengketa DS477 dan DS478: Kebijakan Importasi Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan kepada Dirjen WTO
20.	30 September 2015 Badan Ketahanan Pangan	Rapat Persiapan Sidang <i>the 42nd Session of the Committee on World Food Security</i> tanggal 12 – 15 Oktober 2015 di Roma, Italia	Kemenko Pemb. Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas, Kemenlu, Kemenkes, BKP, Ditjen Tanaman Pangan, PSE & KP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan tentang Persiapan Sidang CFS oleh Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, BKP. Isi pemaparan antara lain: Agenda sidang, side event pada saat Sidang, dan Delri CFS 2. Pembahasan posisi delri 3. Pembahasan administratif keberangkatan 4. Susunan Delri meliputi unsur: BKP, PSE & KP, Pejabat KBRI Roma, dan Atase Pertanian RI di Roma 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat lanjutan di BKP 2. Pusat KLN akan berkomunikasi dengan KBRI Roma dan Atani Roma terkait dengan posisi Delri dan pengaturan Delri.
21.	30 September 2015 Badan Ketahanan Pangan	Rapat koordinasi <i>Launching Inisiatif Zero Hunger Challenge (ZHC)</i>	Kemenko Pemb. Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas, Kemenlu, Kemenhub, Kemensos, Kemenkes, BKP, Ditjen Tanaman Pangan, Badan Karantina Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Perwakilan FAO di Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan tentang <i>Zero Hunger Challenge (ZHC)</i> oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Kemtan. Isi pemaparan antara lain: Informasi awal tentang ZHC, identifikasi ZHC di Indonesia, Persiapan <i>launching</i> ZHC pada Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2015, dan referensi beberapa negara yang telah melakukan <i>launching</i> ZHC. 2. <i>Launching</i> ZHC di Indonesia akan dilakukan pada saat Peringatan HPS 2015 bulan Oktober di Palembang oleh Bapak Presiden RI dan akan diselaraskan dengan agenda Bapak Presiden, apakah akan dilakukan pada Saat Acara Puncak HPS ataukah pada saat kunjungan lapangan. 3. Pembahasan <i>statement</i> Presiden RI terkait <i>Launching ZHC</i>. Kalimat <i>statement</i> disusun secara efektif dan lugas agar <i>launching</i> tidak sebatas <i>launching</i> dan ditindaklanjuti dengan komitmen dari lintas sektor. 4. Perwakilan FAO di Jakarta diharapkan dapat membantu sosialisasi <i>launching ZHC</i> antara lain melalui media elektronik. 	Rapat lanjutan di BKP

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN ATANI

1.	4-5 September 2015 Wisma Padepokan Voli Indonesia, Sentul	Rapat Peningkatan SDM Pengelolaan Aplikasi SIMAK Pelatihan Aplikasi	Eselon I Lingkup Kementan	<p>1. Pedoman pada PMK 526/PMK.06/2014, saat adanya pemeriksaan BPK Kementerian sudah WTP tetapi dengan paragraph penjelasan hasil pemeriksaan angka persediaan contoh Akun 52 sudah diserahkan ke masyarakat tetapi belum ada BAST sebesar kurang lebih Rp. 500 M</p> <p>2. Draft Pedoman Penatausahaan persediaan sebagai Petunjuk Teknis yang berdasarkan PMK 120/2014 untuk dasar pelaksanaan persediaan di lingkup Kementerian Pertanian. Diharapkan masukan dan saran dari masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian</p> <p>3. Pengenalan dan Prosedur Aplikasi Inventaris BMN dengan Absenbm. Seara Teknis diperlukan waktu yang cukup lama untuk inventaris yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan Dokumen Sumber Pelaksanaan Inventarisasi Pelaporan Tindak lanjut. 	
2.	7-8 September 2015 Kab. Subang, Bandung	Pengumpulan Data dan Informasi Kerja Sama Luar Negeri	Dinas Peternakan Kab Subang dan PKLN	<p>Beberapa hasil dari pertemuan :</p> <p>Pemaparan oleh Dinas Peternakan Kab. Subang mengenai program PVUK yang disampaikan oleh Drh. Ferdi Faturrahman (Petugas PVUK)</p> <p>1. Yang telah dilakukan petugas PVUK di Subang adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farmer training sebanyak 8 kali - Kunjungan sebanyak 52 kali - Biaya farmer training ditanggung oleh Dinas Peternakan Kab. Subang dan konsumsi oleh peternak - Dinas peternakan dalam farmer training membantu peralatan seperti Desifektan, Vaksinasi dan Vaksin AI - Transport petugas PVUK ditanggung oleh Dinas Peternakan 	<p>1. Diharapkan kerja sama dan koordinasi lebih baik dan Dinas Peternakan Kab. Subang dapat dilibatkan dalam kegiatan bantuan luar negeri</p> <p>2. Untuk bantuan hibah yang telah selesai dilaksanakan dan agar manfaatnya tepat dapat dirasakan, diharapkan perhatian dan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi</p>

				<p>2. Desa Binaan kegiatan PVUK Kabupaten Subang yaitu : Desa Ckawung, Desa Tanjung Siang, Desa Mekarwangi, Desa Pegaden Barat, Desa Kihiyang dan Binong</p> <p>3. Yang akan dilakukan oleh Petugas PVUK kedepannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farmer training - Pembentukan Kelompok disetiap kecamatan - Mengoptimalkan kunjungan ke peternakan <p>Kunjungan lapangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Cisaat, melihat pelaku usaha ternak unggas dengan system Close House yang jumlah ternaknya 3.000 ekor, yang 1 meternya diisi 7-8 ekor dengan berat 1.4 – 1.7 kg, dan sudah bisa dipanen dalam jangka waktu 30 – 35 hari. - Desa Kihiyang, Binong, melihat pelaku usaha ternak unggas usaha ternak yang menggunakan system Close House yang jumlah ternaknya sebanyak 30.000 ekor yang 1 meternya diisi 15 ekor dengan berat 1,2 – 1,4 kg, sudah bisa dipanen dalam jangka waktu 28 – 31 hari. <p>Jadi Perbedaan antara system Open House dan Close House, dimana pada Close House kandang unggas tertutup dengan terpal sisi dindingnya diblower AC dengan kapasitas listrik 23.000 wat dengan luas 120 meter</p>	<p>3. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan melalui hibah yang diterima tidak hanya yang bersifat teknis juga dapat mencakup kegiatan pembinaan kemampuan SDM dalam bidang kepemimpinan dan perencanaan anggaran</p>
3.	21 September 2015 Hotel Bumi Wiyata, Depok	Rapat Apresiasi Jabatan Fungsional Perencana	Eselon I Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian pertanian	<p>1. Setiap pejabat fungsional wajib mengumpulkan DUPAK minimal 1 tahun sekali, namun hasil kesepakatan dengan Pembina Biro Perencanaan, tiap pejabat fungsional wajib mengumpulkan 2 kali dalam 1 tahun.</p> <p>2. Jika dalam 1 tahun seorang fungsional tidak mengumpulkan DUPAK, pada bulan ke 13, tunjangan kinerja yang bersangkutan akan dipotong 25% dan seterusnya, sampai mengumpulkan DUPAK, namun jika tidak mengumpulkan DUPAK dalam waktu 4 tahun dan</p>	

				<p>tidak dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi, akan diberhentikan sementara dan ditunda gradenya. Jika dalam waktu 5 tahun belum juga mengumpulkan DUPAK atau naik setingkat lebih tinggi, akan diberhentikan dari jabatan fungsional dan dikenakan tuntutan ganti rugi (penggantian uang ke Negara)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian akan memantau dan menempatkan tiap pejabat fungsional pada bidang dan tugas yang pas sesuai dengan Tupoksi sebagai fungsional. 4. Tertib administrasi diperlukan agar pejabat fungsional tidak terkena tuntutan ganti jika tidak dapat mengumpulkan DUPAK dan naik setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu 4 tahun. 5. Pembebasan sementara dalam jabatan fungsional dan pemindahan pejabat fungsional ketempat/bidang yang pas merupakan langkah yang akan diambil, jika pejabat fungsional tersebut tidak dapat mengumpulkan angka kredit. 6. Diperlukan fungsional arsiparis, penerjemah, pada tiap unit kerja Biro/Pusat. 7. Diperlukan dialog dengan pimpinan apabila seorang fungsional ditempatkan pada posisi yang membuat seorang fungsional sulit mengerjakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terhambat dalam pengumpulan angka kredit atau penyusunan DUPAK. Karena dikhawatirkan akan terjadi pemberhentian sementara dan penurunan grade dan tunjangan. 8. Pejabat fungsional dapat dipindahkan agar sesuai dengan Tupoksi sebagai fungsional, jika pada unit kerjanya sulit mengumpulkan angka kredit. 	
--	--	--	--	--	--

4.	25 September 2015 Hotel Arch, Bogor	Desiminasi Kesepakatan Kerja Sama Luar Negeri dan Peraturan Kepegawaian	Pusat KLN	<p>1. Paparan Dr. Donna Gultom Direktur Kerja Sama ASEAN Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan menyampaikan “Masyarakat Ekonomi ASEAN : <i>Memaksimalkan Manfaat Bagi Indonesia</i>) antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Liberalisasi Perdagangan Barang ASEAN Arus Bebas Perdagangan Jasa : Arus Tenaga Kerja Terampil ASEAN Liberalisasi Rezim Investasi ASEAN Pilar ACIA : Liberalisasi, Proteksi, Promosi dan Fasilitasi Kawasan Berdaya Saing Tinggi Pembangunan Ekonomi Yang Merata Integrasi dengan Perekonomian Dunia. <p>2. Paparan Dr,Erwidodo Kepala Pusat Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian menyampaikan “<i>WTO, Putaran Pembangunan Doha Bidang Pertanian dan Paket Bali</i>” antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> WTO dan Keanggotaan Indonesia Peran dan Mandat WTO Kewenangan di WTO Kepentingan Indonesia di WTO Hak dan Kewajiban Anggota WTO Penanganan Sengketa Dagang di Dispute Settlement Body WTO Kasus Sengketa Dangang di WTO Aturan WTO dalam Perdagangan Produksi Pertanian Perundingan (Putaran) Pembangunan Doha Paket Bali Bidang Pertanian Beberapa Skenario KTM-WTO ke 10 di Nairobi (15-18 Desember 2015). Memfaatkan “General Service” Untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi Pangan Nasional. Kebijakan Perdagangan Mendukung Ketahanan Pangan Nasional 	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan regulasi yang berorientasi penciptaan daya saing dan. Harmonisasi regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana Pemerintah Daerah menyiapkan regulasi yang mendukung dan tidak bertentangan dengan kewajiban pusat. Dukungan pendanaan untuk berbagai kegiatan dalam menunjang kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan MEA seperti dana sosialisasi/edukasi publik dan dana bimbingan teknis. Indonesia menekankan dan mengusulkan perlu adanya kredibilitas dan pemasukan konkrit dari kompetisi tenaga kerja Indonesia meminta Negara maju untuk menahan diri berkaitan dengan segala bentuk subsidi ekspor dan semua tindakan yang ahli dan setara. Seluruh pegawai Pusat KLN segera membuat dan mendaftar e-PUPNS.
----	--	---	-----------	--	--

				<p>3. Paparan Listiati SH, Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan menyampaikan “Aspek Hukum Displin Pegawai, Prosedur Pejnatuhan Hukuman, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kasus Displin Pegawai dan Pendataan Ulang PNS Secara Elektronik (e-PUPNS 2015)” antara lain :</p> <p>a. PP Nomor 53 Tahun 2010, Displin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.</p> <p>b. e-PUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui system teknologi informasi yang meliputi tahap pemutaktriran data oleh setiap PNS serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat maupun daerah sesuai kewenangan yang dimiiki.</p> <p>c. Tujuan e-PUPNS adalah untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi sebagai dasar kebutuhan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara.</p> <p>d. Jadwal pelaksanaan e-PUPNS adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persiapan dilakukan oelh user admin system paling lambat akhir bulan Agustus 2015. - Pengisian Formulir e-PUPNS dilakukan sampai dengan akhir bulan November 2015. - Proses verifikasi dilakukan sampai dengan akhir bulan Desember 2015 <p>e. Sanksi bagi PNS yang tidak mengikuti PUPNS 2015, akan dikeluarkan dari database ASN Nasional di BKN dan tidak akan mendapatkan layanan kepegawaian.</p>	
5.	29-30 September 2015 Balitri, Parungkuda Jawa Barat	Pengumpulan Data dan Informasi Dokumentasi Kerja Sama Luar Negeri.	Balitri dan PKLN	<p>Bahwa perkembangan kegiatan Program SMARTD (<i>Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination</i>) yang didanai oleh World Bank antara lain</p> <p>1. Proyek SMARTD TA 2014, membangun paket laboratorium terpadu yang terdiri dari 1 unit Gedung Laboratorium Terpadu, 2 unit Screen</p>	<p>1. Secara umum pelaksanaan Poryek SMARTD di BALITRI relative bagus, untui itu semua pelaksana proyek SMARTD perlu dikumpulkan untuk</p>

				<p><i>House</i>, 4 unit <i>Glass House</i>, 1 unit <i>Glass House Temperature and Humidity Control</i>, 1 unit pengerasan jalan dan lahan parkir laboratorium, 1 unit drainase kawasan, 1 unit bangunan pagar, 1 unit teralis laboratorium.</p> <p>2. Terdapat 1 bangunan yang tidak disediakan yaitu Unit Pengolahan Limbah (UPL), dikarenakan tidak dianggarkan oleh World Bank. Bangunan UPL ini direncanakan akan menggunakan dana APBN.</p> <p>3. Semua bangunan tersebut telah diserahkan kepada BALITRI pada tahun 2014.</p> <p>4. Pada TA 2015, proyek SMARTD akan mengadakan peralatan laboratorium untuk BALITRI diantaranya 1 unit <i>Microscope Compound</i> dari Jepang, 1 unit Oven dari Korea Selatan.</p> <p>5. Dari sisi indikator keuangan, pelaksanaan Proyek SMARTD di BALITRI ini termasuk kategori baik dengan realisasi pembangunan fisik yang mencapai 100% (pada tempat lain seperti BBIOGEN realisasi baik bangunan baru mencapai 60%)</p> <p>6. Dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, ada perbedaan peraturan yang digunakan, yaitu bersumber pada Perpres dan aturan dari World Bank, perbedaan ini berakibat adanya temuan yang harus dijelaskan kepada pemeriksa</p>	<p>mencari solusi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan.</p> <p>2. Kerja sama dengan rekanan/agent harus solid, tidak saling menyalahkan jika menemui kendala, mencari solusi bersama dengan cepat.</p> <p>3. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan melalui hibah yang diterima tidak hanya yang bersifat teknis juga dapat mencakup kegiatan pembinaan kemampuan SDM dalam bidang kepemimpinan dan perencanaan anggaran.</p>
6.	29 Sep – 2 Okt 2015 Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Malang dan BPTP Provinsi Jawa Timur	Pelatihan Aplikasi SAIBA dan SIMAK - BMN	Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal	<p>1. Penyusunan Laporan keuangan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehat dalam pemerintahan dengan basis Akrual akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan.</p>	<p>1. Masalah persediaan untuk Laporan keuangan agar tahun depan tidak ada temuan BPK</p> <p>2. Diharapkan agar tahun depan ada WTP di lingkup Kementan dan memperbaiki WTP sebelumnya.</p>

				<p>2. Permasalahan/kendala yang dihadapi saat ini bagi petugas SAIBA dan SIMAK BMN adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Selalu mengganti petugas Operator SAIBA dan SIMAK BMN Selalu mengganti petugas Operator SAIBA dan SIMAK BMN Pengiriman Back Up yang selalu ditagih tiap bulannya. Keterlambatnya dalam menyusun Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan jadwal. 	<p>3. Diharapkan agar Jadwal Palang untuk setiap kegiatan agar serapan terealisasi.</p> <p>4. Diharapkan SAIBA Laporan Keuangan Berbasis Akrual agar dapat WTP murni dan memperhatikan Laporan Keuangan sebagai atalase Laporan Keuangan Kementerian.</p>
7.	1-30 September 2015 Pusat KLN Kementan	Penugasan Pejabat/ Pegawai Kementan ke luar negeri	Sekneg, Kemenlu, Kedutaan Besar Negara terkait dan Eselon I Lingkup Kementan.	Telah diproses penugasan pejabat/pegawai Kementan ke luar negeri sebanyak 155 orang yaitu mengikuti workshop/seminar sebanyak 19 orang, menghadiri pertemuan/siding sebanyak 69 orang, mengikuti pelatihan/training sebanyak 13 orang, melakukan kunjungan sebanyak 51 orang, program S2 sebanyak 1 orang, program S3 sebanyak 2 orang.	